



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



DJPb  
Indonesian Treasury



Hari Bakti  
Perbendaharaan

Dua Dekade Indonesian Treasury  
Terus Bertransformasi Dalam Melayani Negeri



Mini

# SIPIIN

SEPUTAR INFORMASI PERKEMBANGAN FISKAL & EKONOMI

Vol. 02 Tahun 2024



# Kata Pengantar



**BURHANI AS**  
**Kepala Kanwil DJPb**  
**Provinsi Jambi**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Mini Buletin Sekilas Informasi Perkembangan Fiskal dan Ekonomi (Mini SIPIN) Vol. 02 Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Buletin ini disusun selain sebagai sarana informasi kinerja dan capaian APBN dan APBD dan publikasi implementasi *Regional Chief Economist* dan *Financial Advisor* guna mendukung akselerasi pembangunan di Provinsi Jambi, juga sebagai bahan bacaan yang kami dapat menambah wawasan dan pengetahuan.

Kami harap, SIPIN dapat memberi manfaat kepada para pembaca. Kami akan terus mengharapkan umpan balik yang membangun dari para pembaca sehingga buletin ini semakin sempurna.

***"Naik sepeda ke arah Broni  
Tujuan utama ke Gentala Arasyi  
Selamat membaca buletin ini  
Semoga bermanfaat dan menginspirasi"***

Selamat membaca bulletin SIPIN ini  
Semoga bermanfaat dan menginspirasi

# DAFTAR ISI

01

## Realisasi APBN dan Tematik

- Realisasi APBN Lingkup Provinsi Jambi s.d. 29 Februari 2024
- Yuk Kenal Belanja Bansos!

03

## Pojok TKD

- Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa s.d. 29 Februari 2024
- Yuk Kenal TKD! : Dana Alokasi Umum

05

## Pojok UMKM

- Realisasi Penyaluran KUR-UMi sampai dengan 29 Februari 2024
- Jelajah UMKM : Lapis Legit Tanggo Rajo

07

## Pojok Peraturan

- SAKTI, Cukup Satu Untuk Negeri

08

## Pojok Akuntansi

- Sekilas Info Akuntansi: PSAP 02-Laporan Realisasi Anggaran

09

## Pasar Tani

10

## Kegiatan Kanwil

12

## Kegiatan KPPN

13

## Fun Games



*Selamat Membaca!*



# REALISASI APBN

## LINGKUP PROV. JAMBI

s.d. 29 Februari 2024

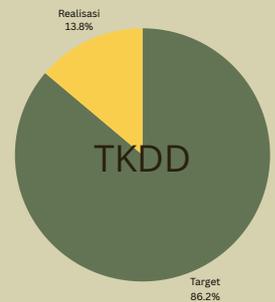
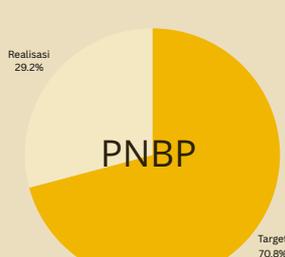


Realisasi pendapatan negara regional Jambi sampai dengan 29 Februari 2024 sebesar Rp1.084,21 M atau mengalami kontraksi sebesar 6,83% (y-o-y). Penerimaan perpajakan sampai dengan Februari 2024 sebesar 840,63 dengan kontribusi terbesar dari penerimaan PPN sebesar 51,43% dari Total Penerimaan Perpajakan.

Sampai dengan Februari 2024 realisasi PNBP tercatat sebesar Rp243,58 M dengan PNBP Lainnya tercatat sebesar Rp92,91 M dan PNBP BLU Rp149,68 M. Capaian ini Lainnya untuk bulan ini merupakan capaian terbesar kedua selama 5 tahun terakhir paling banyak disumbang dari Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL dan Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL. Sama halnya dengan PNBP BLU s.d. bulan Februari 2024 mencatatkan realisasi tertinggi dalam 5 tahun terakhir pada periode yang sama yang dominasi terbesar disumbang oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (satker UIN STS Jambi, UNJA, dan Poltekkes Jambi) serta Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (satker RS Bratanata dan Rumkit Bhayangkara).

Pada sisi belanja, realisasi sampai dengan 29 Februari 2024 sebesar Rp3.303,12 M atau terelaksasi sebesar 30,55% (y-o-y), terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp956,68 M dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) sebesar Rp2.346,45 M. Dengan demikian, terjadi defisit regional sebesar Rp2.218,91 M.

Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Februari 2024 tumbuh cukup baik terutama untuk Belanja Pegawai, Barang dan Modal. Belanja pegawai tumbuh disebabkan adanya penambahan jumlah pegawai di tahun 2024 pada Kementerian Agama, Polri, dan Kementerian Pertahanan. Belanja barang tumbuh disebabkan peningkatan belanja barang pada satker-satker KPU dan Bawaslu dalam rangka pemilu 2024. Peningkatan belanja modal terjadi pada satker-satker PUPR, BPS, dan Kemendikbud Ristek. Peningkatan signifikan terjadi pada satker PJI I dan PJI II atas realisasi Preservasi Jalan Strategis dan Rehabilitasi Jalan, beberapa satker BPS atas realisasi pengadaan kendaraan bermotor (mobil dinas), dan kemendikbud Ristek atas realisasi proyek museum dan pemugaran kompleks Candi Muaro Jambi.



# Yuk Mengenal!

## BELANJA BANTUAN SOSIAL

“Belanja bantuan sosial atau lebih dikenal dengan belanja bansos adalah salah satu jenis belanja negara yang dibiayai oleh APBN”.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Anggaran, Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Belanja Bansos termasuk ke dalam belanja fungsi perlindungan sosial (Perlinsos) yang sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk merespons berbagai risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat, baik yang diakibatkan oleh risiko siklus hidup, keadaan disabilitas, bencana, dan guncangan sosial ekonomi, terutama untuk warga negara yang miskin dan rentan.

Dalam APBN tahun anggaran 2024, Bansos dialokasikan sebesar Rp152 M dengan arah kebijakan:

- (1) melanjutkan penyaluran bantuan sosial antara lain PKH, Kartu Sembako, KIP Kuliah, PIP, bantuan premi PBI JKN, rehabilitasi sosial untuk anak, lansia dan penyandang disabilitas, serta mendorong bantuan sosial yang adaptif dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- (2) meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial, dengan memanfaatkan hasil pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, dan pemutakhiran data penerima bantuan secara berkelanjutan; dan
- (3) meningkatkan kualitas implementasi program termasuk penguatan graduasi dari kemiskinan antara lain dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan memperkuat sinergi antar *stakeholder*.

Jenis Bansos	Januari 2024	Februari 2024	Total
PKH	48.369	10.890	59.259
BPNT	33.974	25.259	59.234
Prakerja	0	0	0
Pos Sembako	0	0	0
YAPI	0	66,4	66,4
Total	82.344	36.216	118.560

Penyaluran Bantuan Sosial di provinsi Jambi sampai dengan 29 Februari 2024 sebesar Rp118,56 M atau tumbuh sebesar 117,23% dibandingkan tahun 2023 (penyaluran Rp54,58 M). Peningkatan ini dipicu oleh peningkatan jumlah penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), percepatan penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta bantuan YAPI (Yatim Piatu) yang sebelumnya di tahun 2023 tidak ada penyaluran. Penyaluran PKH pada 2024 meningkat 243,91% (yoy) terutama peningkatan penyaluran di Kota Jambi (Rp9 M), Tanjabtim (Rp6,8 M), Merangin (Rp5,1 M), Tanjabbar (Rp4,5 M), Kerinci (Rp4,2 M), dan Kab. Bungo (Rp4,2 M). Penyaluran BPNT pada 2024 mengalami percepatan penyaluran sebesar Rp59,23 M pada 11 Kab/Kota di Provinsi Jambi, dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023. Sedangkan untuk bantuan Prakerja dan Pos Sembako sampai dengan 29 Februari 2024 belum terdapat penyaluran. Penyaluran bantuan Yatim Piatu (YAPI) pada tahun 2023 tidak terdapat penyaluran, pada Februari 2024 terdapat penyaluran sebesar Rp66,4 juta yang tersebar di seluruh Kab/Kota di Provinsi Jambi dengan penyaluran terbanyak pada Kota Jambi sebesar Rp11,6 Juta dan disusul oleh Kabupaten Batanghari sebesar Rp12 Juta. Dengan meningkatnya jumlah penyaluran Bantuan Sosial diharapkan dapat melindungi masyarakat Provinsi Jambi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

# PERKEMBANGAN REALISASI TKD

s.d. 29 Februari 2024

Dalam mendukung pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa melalui penyaluran transfer ke daerah dan dana desa, realisasi TKD di wilayah Jambi sampai dengan 29 Februari 2024 telah terealisasi Rp2.346,45 M atau 15,99% dan mengalami peningkatan sebesar 23,54% (yoy) apabila dibandingkan Februari 2023. Peningkatan ini diakibatkan oleh kenaikan nilai penyaluran DBH sebesar 15,29%, kenaikan nilai penyaluran DAU sebesar 15,33%, kenaikan nilai penyaluran DAK Nonfisik sebesar 101,88% dan kenaikan nilai penyaluran Dana Desa sebesar 9,63%.

Penyaluran Dana Bagi Hasil tumbuh didorong oleh percepatan penyaluran DBH SDA Minerba, DBH SDA Migas, DBH SDA Panas Bumi, dan DBH SDA Perikanan. Penyaluran Dana Alokasi Umum tumbuh didorong oleh peningkatan alokasi DAU *Block Grant* perbulan. Penyaluran DAK Non Fisik tumbuh didorong oleh percepatan penyaluran BOK Puskesmas, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan. Sementara itu, percepatan penyaluran dana desa merupakan hasil dari koordinasi dan sinergi yang baik antara KPPN dan DPMD mengingat penyaluran dana desa tahun 2024 mengalami perubahan mekanisme yang mengharuskan Desa untuk melakukan penandaan (*tagging*) terhadap pengalokasian Dana Desa pada APBDes yang bersifat earmarked. Sementara itu, DAK Fisik, Insentif Fiskal dan Transfer Hibah belum terdapat penyaluran pada bulan Februari 2024.

Jenis TKD	Pagu	Realisasi s.d. Februari 2024	%
DBH	2.278,69	271,95	11,93%
DAU	8.230,34	1.570,67	19,08%
DAK Fisik	932,23	0,00	0,00%
DID	49,61	0,00	0,00%
DAK Nonfisik	1.971,58	379,34	19,24%
Dana Desa	1.178,32	124,49	10,57%
Transfer Hibah	31,78	0,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>14.672,57</b>	<b>2.346,45</b>	<b>15,99%</b>

(dalam miliar rupiah)

# Yuk Mengenal!

## Dana Alokasi Umum

Sudahkah kalian mengenal Dana Alokasi Umum? Dana Alokasi Umum atau yang disingkat menjadi DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah. Pengelolaan Dana Alokasi Umum diatur dalam PMK Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

Pada awalnya, hanya ada DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. Namun, mulai tahun 2023, DAU terdiri atas DAU yang tidak ditentukan penggunaannya atau DAU *Block Grant* dan DAU yang ditentukan penggunaannya atau DAU *Specific Grant*.

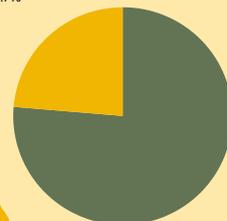
Berdasarkan UU HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah.

DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas dukungan penggajian PPPK Daerah; dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dukungan bidang pendidikan; dukungan bidang kesehatan; dan dukungan bidang pekerjaan umum.

Dalam alokasi 2024, Proporsi DAU di lingkup Provinsi Jambi mencapai 56,09% dari total alokasi Transfer ke Daerah dengan DAU *Block Grant* sebesar 76,34% dan DAU *Specific Grant* sebesar 23,66% dari total pagu DAU. Sampai dengan 29 Februari 2024, baru terdapat penyaluran DAU *Block Grant* di Provinsi Jambi sebesar 1,57 Triliun atau 19,08% dari total alokasi DAU sebesar 8,23 Triliun.

PROPORSI

DAU Ditentukan Penggunaannya  
23.7%



DAU Tidak Ditentukan Penggunaannya  
76.3%

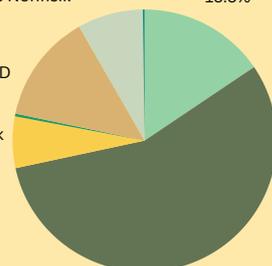
ALOKASI

Dana Alokasi Khusus Nonfisik  
13.4%

Dana Bagi Hasil  
15.5%

Dana Otsus, Keistimewaan DIY, dan DID  
0.3%

Dana Alokasi Khusus Fisik  
6.4%



Dana Alokasi Umum  
56.1%



# REALISASI PENYALURAN KUR-UMI S.D. 29 FEBRUARI 2024

Kab/Kota	s.d. 29 Februari 2024	
	Jumlah Debitur KUR	Jumlah Penyaluran (dalam Miliar rupiah)
KAB. BATANGHARI	1.033	90,24
KAB. BUNGO	1.124	110,31
KAB. KERINCI	968	60,01
KAB. MERANGIN	1.417	128,39
KAB. MUARAJAMBI	1.794	154,59
KAB. SAROLANGUN	882	71,94
KAB. TANJABBAR	1.873	131,24
KAB. TANJABTIM	119	13,41
KAB. TEBO	1.331	103,86
KOTA JAMBI	1.425	115,09
KOTA SUNGAIPENUH	358	27,14
<b>Total</b>	<b>12.324</b>	<b>1.006,22</b>

Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Jambi tahun 2024 s.d. 31 Januari 2024 telah disalurkan kepada 12.324 debitur dengan total penyaluran adalah Rp1.006,22 M (16,9% dari target Rp5.940 miliar). Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini hingga 31 Januari 2024 skema pinjaman KUR Mikro mengambil porsi terbesar. Sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi adalah sektor pertanian perburuan dan kehutanan dengan jumlah Penyaluran Rp660,39M (65,5%), sedangkan secara nasional didominasi sektor perdagangan besar dan eceran (47,55%). Dibandingkan tahun 2023, penyaluran 2024 s.d. 29 Februari 2024 tumbuh 414,2% (yoy). Hal ini dikarenakan pada awal tahun 2023 terdapat perubahan Permenkop sehingga tidak ada penyaluran KUR oleh Bank pada awal tahun.

Sumber: SIKP (data per 5 Maret 2024, diolah)

Kab/Kota	s.d. 29 Februari 2024	
	Jumlah Debitur UMi	Jumlah Penyaluran (dalam Juta rupiah)
KAB. BATANGHARI	409	2.159,00
KAB. BUNGO	743	4.217,63
KAB. KERINCI	384	2.014,00
KAB. MERANGIN	480	2.826,00
KAB. MUARAJAMBI	558	3.035,00
KAB. SAROLANGUN	500	2.837,50
KAB. TANJABBAR	425	2.795,50
KAB. TANJABTIM	590	3.140,00
KAB. TEBO	894	5.176,87
KOTA JAMBI	1.064	6.168,00
KOTA SUNGAIPENUH	1	8,00
<b>Total</b>	<b>6.048</b>	<b>34.377,50</b>

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Provinsi Jambi tahun 2024 sampai dengan 31 Januari 2024 telah disalurkan kepada 6.048 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp34,38 M. Skema terbanyak yang diambil oleh debitur di Provinsi Jambi adalah skema kelompok, dengan penyalur PNM. Nilai penyaluran UMi di Provinsi Jambi didominasi dari wilayah Kota Jambi dan Kabupaten Tebo. Penyaluran pada tahun 2024 s.d. 29 Februari 2024 mengalami peningkatan sebesar 259,18% (yoy). Penyaluran UMi di Provinsi Jambi berkontribusi sebesar 9,47% dari penyaluran di Sumatera dan 3% terhadap penyaluran nasional.

Sumber: SIKP UMi (data per 5 Maret 2024, diolah)

Proses produksi Lapis Legit Tanggo Rajo dilakukan 3 kali seminggu dengan hasil 300 kemasan/hari hingga 1.100 kemasan/minggu. Pengemasan dengan plastik sederhana namun tetap dapat menjaga kualitas dari produk sendiri dan tidak lupa terdapat stiker informasi produk.

Terbuat dari bahan baku berkualitas yang diperoleh dari mall tempat penjualan kue, sedangkan selai nanas diperoleh dari rekan yaitu Abadi.

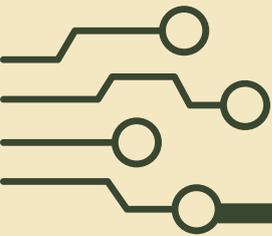
# LAPIS LEGIT TANGGO RAJO



Dapat dibeli di:  
 Wa.me/6285208005800  
 Trona Supermarket, Meranti Supermarket,  
 Mandala, Fresh Group

atau langsung aja scan disini!





# SAKTI

## CUKUP SATU UNTUK NEGERI



Siapa dari pembaca di sini yang keseharian dalam pekerjaannya menggunakan aplikasi SAKTI?

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau yang biasa disebut dengan SAKTI, merupakan wujud inovasi dari **Direktorat Jenderal Perbendaharaan** dalam menerapkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk pengelolaan keuangan negara. SAKTI ini mengintegrasikan seluruh sistem pada aplikasi satuan kerja mulai dari tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Jangan sampai ketinggalan! Terdapat peraturan terbaru terkait pelaksanaan Sistem SAKTI melalui PMK Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 171 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI. PMK Perubahan ini disusun untuk menyempurnakan proses bisnis perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban APBN, sejalan dengan perkembangan sistem dan teknologi informasi yang kian melaju pesat.



Lalu, apa saja yang berubah?

Pertama, terdapat penambahan 2 modul baru, yaitu **Modul Referensi** dan **Modul Sinkronisasi Renja – RKA**. Penambahan modul ini menjadikan SAKTI yang semula memiliki 9 modul menjadi 11 modul.

Kedua, penerapan **Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi**, termasuk perluasan penerapan One Time Password (OTP). Hal ini dalam rangka digitalisasi transaksi, penerapan keamanan transaksi elektronik, dan akuntabilitas penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Ketiga, pengaturan pencatatan informasi terkait **Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)** sebagai sarana dukungan terhadap pelaksanaan program strategis pemerintah. P3DN berpeluang meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan, guna menumbuhkan kemandirian bangsa dan meningkatkan peran Indonesia dalam rantai suplai global, juga wujud nyata membangkitkan semangat nasionalisme dalam mencintai dan menggunakan produk dalam negeri.

Tentunya masih terdapat beberapa perubahan lainnya yang dapat pembaca kulik lebih lanjut, dengan harapan dapat terciptanya peningkatan pada kualitas layanan serta kualitas tata kelola dan manajemen data melalui otomatisasi dan simplifikasi proses serta pengelolaan data referensi yang reliabel, akurat, dan *up to date* pada aplikasi SAKTI.



# SEKILAS INFO AKUNTANSI:

## PSAP 02 - LAPORAN REALISASI ANGGARAN



Kali ini kita akan mengulas mengenai PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. PSAP 02 membahas mengenai definisi akuntansi dari akun-akun anggaran dan transaksi yang berkaitan, tujuan pelaporan, ruang lingkup dan manfaat informasi realisasi anggaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. PSAP 02 ini berlaku bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

PSAP 02 diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah, Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah. Di dalam LRA sekurang-kurangnya mencakup pos-pos diantaranya: Pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA).

Informasi apa saja sih yang disajikan dalam LRA? Dalam LRA entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan LRA dan untuk rincian lebih lanjut akan pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu, entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA, klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dari penyusunan LRA diperoleh manfaat untuk mengetahui informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi performance dalam efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran.



# PASAR TANI



Pasar Tani kembali diadakan pada perayaan HUT Provinsi Jambi ke-67 dengan melibatkan seluruh dinas pertanian dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Kegiatan Pasar Tani diselenggarakan pada tanggal 13 Januari 2024, di sekitar Kantor Gubernur Provinsi Jambi. Pada acara tersebut ditampilkan berbagai macam sayuran organik segar dan beragam bibit sayuran, selain itu juga ditampilkan tanaman sorgum. Kanwil DJPb Provinsi Jambi juga berpartisipasi loh dalam acara ini.



# Kegiatan di Kanwil



## **Pengambilan Sumpah PNS di Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi**

Telah dilakukan Pengambilan Sumpah PNS terhadap 14 CPNS di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi. Semoga para CPNS yang dilantik pada kesempatan ini dapat mengemban amanah dan terus semangat mengabdikan untuk negeri, serta terus mengedepankan integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



## **Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan dan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2024 di KPPN Kuala Tungkal**

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas monev pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan selama tahun 2023, untuk meningkatkan pemahaman satker yang kurang memiliki berkontribusi pada capaian nilai IKPA yang belum optimal serta arahan Menteri Keuangan agar satker K/L melaksanakan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran (LLSPA) TA. 2024 dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

## **Pembinaan Penyusunan LK UAKBUN-D dan Koordinasi LKPD pada KPPN dan Pemda Lingkup KPPN Bangko dan KPPN Muara Bungo Tahun 2024**

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan tujuan dapat meningkatkan sinergi antara Kanwil DJPb Provinsi Jambi dengan KPPN dan Pemda lingkup KPPN Bangko dan KPPN Muara Bungo. Selain itu, dapat menjadi bahan evaluasi untuk kebijakan-kebijakan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.



## Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pemkab Kerinci

Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergi Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik dalam Pelaksanaan HKPD bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Burhani AS sebagai perwakilan dari Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan Bapak Asraf sebagai perwakilan dari Pemkab Kerinci, bertempat di Kantor Bupati Kab. Kerinci pada 27 Februari 2024. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjalin komunikasi dan sinergi yang kolaboratif dengan pemda untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah. Selain itu, disampaikan juga reviu dari pelaksanaan anggaran dari Pemkab Kerinci.

## Penandatanganan Perjanjian Kinerja, SKP, Pakta Integritas, dan Ikrar Netralitas serta Pembangunan ZI Menuju WBBM

Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah melakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai, Pakta Integritas, dan Ikrar Netralitas Pegawai Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi secara hybrid bersama KPPN di Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi. Acara pembacaan Ikrar Netralitas ASN dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Bapak Burhani AS yang diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai.

## Monev dan Pembinaan Implementasi SMM ISO 9001:2015 dan Pengujian Kepatuhan UKI pada KPPN Bangko.

Telah dilaksanakan kegiatan ini dilakukan pada 26 Februari s.d. 28 Februari 2024 bertempat di KPPN Bangko. Melalui kegiatan ini, diharapkan KPPN Bangko telah siap bila kedepannya ada proses audit dan/atau resertifikasi oleh Badan Sertifikasi Independen.



# Kegiatan di KPPN



FGD Implementasi CMS dan KKP  
KPPN KUALA TUNGKAL



Sosialisasi Penggunaan Dana BOSP  
KPPN SUNGAI PENUH



FGD Pemberdayaan UMKM  
KPPN BANGKO

- Dalam rangka kegiatan transaksi non tunai melalui implementasi CMS dan KKP, KPPN Kuala Tungkal bersinergi dengan Bank BSI Cabang Kuala Tungkal melaksanakan FGD pada Rabu, 7 Februari 2024 di Aula KPPN Kuala Tungkal. KPPN Kuala Tungkal mengapresiasi Satker MTsN 3 Kab. Tanjung Jabung Barat yang telah bertransaksi secara aktif menggunakan CMS. Melalui FGD ini, diharapkan Bank Mitra KPPN Kuala Tungkal terus mendukung dan melakukan asistensi dan pendampingan, sehingga progres Satker yang telah menggunakan CMS persentasenya dapat meningkat.
- KPPN Sungai Penuh menghadiri undangan dari Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh sebagai narasumber. Kegiatan ini mendukung peran KPPN sebagai Financial Advisor di daerah dalam rangka memberikan pemahaman komprehensif baik dari perspektif strategis maupun teknis kepada pemerintah daerah serta menjadi wujud asistensi dan koordinasi KPPN Sungai Penuh kepada Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh dalam meningkatkan kualitas layanan dalam penyaluran Dana BOSP Tahun 2024.
- FGD Pemberdayaan UMKM KPPN Bangko menyelenggarakan FGD pada Kamis, 22 Februari 2024 bertempat di Kantor Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kab. Sarolangun dengan mengundang Kepala Dinas KUKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Sarolangun. Tujuan kegiatan ini adalah untuk sharing informasi terkait pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan mendorong optimalisasi transaksi non tunai pada UMKM.

# Fun Games

$$\begin{array}{ccccccc}
 \text{🐢} & + & \text{🐢} & + & \text{🐢} & = & 12
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc}
 \text{🥚} & + & \text{🥚} & - & \text{🐢} & = & 6
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc}
 \text{🍲} & + & \text{🐢} & + & \text{🥚} & = & 16
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc}
 \text{🐢} & \times & \text{🥚} & - & \text{🍲} & = & ???
 \end{array}$$

## Syarat dan Ketentuan:

1. Kirim jawaban Anda ke alamat email [djpbjambi@gmail.com](mailto:djpbjambi@gmail.com) dengan subjek Fun Games Mini SIPIN.
2. Jawaban disertai data diri berupa nama, nomor telepon dan email.
3. Jawaban paling lambat diterima pada pukul 23.59 WIB tanggal 3 April 2024.
4. Nama pemenang akan diumumkan pada Majalah Mini SIPIN edisi berikutnya.
5. Hadiah dikirim ke nomor telepon pemenang sesuai informasi yang diberikan dan konfirmasi melalui nomor telepon.

# Selamat!

Kepada Para Pemenang Fun Games Vol. 1



*Affan Gustiawan Putra*

*Safira Rakhmadani*

Pemenang akan dihubungi oleh Tim Humas kami, ya!

Jawaban Fun Games Vol. 1:

1. DANAU SIPIN
2. PERBENDAHARAAN



SEMUA LAYANAN KANWIL

Rp 0

DJPB PROVINSI JAMBI

## SALURAN PENGADUAN

SMS



0852-8266-0367 | [s.id/Pengaduan06](https://s.id/Pengaduan06)



[kanwiljambi.pengaduan@gmail.com](mailto:kanwiljambi.pengaduan@gmail.com)



[djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jambi](https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jambi)



[pengaduandjpb.kemenkeu.go.id](https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id)



[wise.kemenkeu.go.id](https://wise.kemenkeu.go.id)



# TIM REDAKSI

MINI SIPIN - SEKILAS INFORMASI PERKEMBANGAN FISKAL DAN EKONOMI

Pengarah

**Burhani AS**

Ketua Tim Redaksi

**Ahmar Rudi**

Penyunting

**M. Ichsan Arditriansyah**

Tim Redaksi

**Romeo Junianto, Ernawati Maksudi, Rizka Andira Wulandari, Agatha Early Ameliana, Annisa Ainnur Farah, Sulistiana**

Desain dan Layout

**Raudya Tuzzahra, Allyza Nur Amalia, Yan Yosephin Saragi, Maisya Hanifah Salsabila, M. Ichsan Arditriansyah**



Volume 02 Tahun 2024



*Mini*  
**SIPIN**

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI

